

BAB III

MENGENAL SEKILAS KSPPS KI AGENG PANDANARAN: SEJARAH, VISI, MISI, PRODUK, DAN STRATEGI PEMASARAN

A. Sejarah Perkembangan KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang

Ajaran Islam adalah suatu konsep kehidupan yang universal mencakup seluruh aspek kebutuhan manusia, baik fisik material maupun mental spiritual. Khusus dalam bidang ekonomi yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia baik individu maupun kolektif, perlu mendapat perhatian agar mencapai pemerataan yang adil dan dapat menumbuhkembangkan aspek sosial masyarakat.

Untuk itu perlu dilakukan upaya pemberdayaan yang menyeluruh terutama di lingkungan keluarga miskin, sehingga tidak melahirkan kehidupan yang pincang dan tidak seimbang antara kemajuan ekonomi yang dicapai oleh kelompok orang-orang kaya dengan kondisi kehidupan kelompok orang-orang miskin. Ketidakeimbangan itu dapat berakibat terjadinya kesenjangan sosial dan dendam sosial.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan, disamping membangkitkan semangat bekerja dan berwiraswasta dengan memberikan ketrampilan-ketrampilan, juga melalui langkah-langkah pemberian modal kepada keluarga miskin yang diambilkan dari zakat, infaq, dan sedekah dari orang-orang kaya yang sebenarnya juga adalah hak mereka.

Dengan perpaduan ilmu dan ketrampilan didukung oleh modal yang memadai untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat, maka secara bertahap insyaAllah kelompok masyarakat miskin akan berkurang secara berangsur-angsur. Hal itu hanya dimungkinkan bila adanya kesadaran dan rasa tanggung jawab dari pelaku dakwah dan kelompok orang-orang kaya untuk mendanai kegiatan dakwah tersebut.

Islam adalah agama yang anti kemiskinan, tetapi menyayangi orang-orang miskin, baik miskin harta, miskin ilmu, dan miskin iman. Allah sangat murka terhadap orang-orang Islam yang tidak peduli terhadap kehidupan orang-orang miskin. Sampai dikatakan sebagai kelompok pendusta agama (QS. Al-Ma'un (107): 3). Sebab bila kemiskinan semakin merata yang disebut kefakiran, maka kekufuran atau kedurhakaan hingga kemurtadan mudah terjadi, karena kekuatan iman sangat dipengaruhi oleh terpenuhinya kebutuhan pokok manusia seperti makan, pakaian, dan perumahan (Kayo, 2007 : 71-75).

Dari rasa keprihatinan beberapa tokoh masyarakat beserta jama'ah masjid di wilayah kelurahan Mugas sari akan keadaan ekonomi yang terjadi secara nasional, maka

dibentuklah suatu lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan ini dibentuk atas inisiatif jamaah masjid berkenaan dengan adanya program pemerintah yang bernama Program Penanggulangan Pekerja Trampil (P3T) pada tahun 1998 dengan harapan bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat kelas bawah yang merasakan dampak krisis moneter secara nasional ini.

Disamping itu belum adanya komitmen dari lembaga perbankan untuk menciptakan usaha yang lebih adil untuk lebih mensejahterakan masyarakat. Bunga bank juga menjadi dasar operasional perbankan (konvensional) juga masih menjadi perdebatan di kalangan umat islam.

Lembaga keuangan di dalam sistem keuangan modern mempunyai kedudukan yang penting dalam memanfaatkan potensi-potensi ekonomi menjadi sesuatu yang produktif. Karena dengan melalui lembaga keuangan ini, sumber daya keuangan yang ada di masyarakat dapat dikelola dengan baik.

Menyadari akan hal tersebut, timbul kesadaran untuk mencoba memikirkan bentuk alternatif sebagai wujud peran serta dalam pembangunan masyarakat. Akhirnya disepakati untuk merintis berdirinya BAITUL MAAL WAT-TAMWIL (BMT) berkantor di Balai RW 1 Kelurahan Mugassari Semarang.

Disamping hal tersebut diatas, BMT Ki Ageng Pandanaran juga ingin menjadi jembatan antara ummat Islam yang mempunyai dan berlebih dan umat Islam yang membutuhkan dana untuk modal usaha. Koperasi BMT Ki Ageng Pandanaran beroperasi mulai tanggal 1 Oktober 1998, pada saat itu masih berbentuk Lembaga Mandiri Mengakar Masyarakat (LM3) dengan modal awal sebesar RP. 12.000.000,00.

Tahun 2003 menjadi titik balik dari perkembangan BMT Ki Ageng Pandanaran, dibawah pengurus baru BMT ini dapat berkembang dengan baik , karena pengurus dan anggota koperasi saling bahu membahu untuk memajukan BMT yang mereka cintai.

Tercetusnya ide mendirikan BMT Ki Ageng Pandanaran tersebut, dengan memanjatkan kehadiran Allah SWT, tanggal 1 Oktober 1998 pembentukan BMT melalui Program P3T (Program Penanggulangan Pekerja Trampil) di Masjid Arrohmah yang terletak di jalan mugas dalam no.6.

Penggagas didirikan BMT di lingkungan mugas dalam yaitu Ir. Soetadi, Ateng Chozany Miftah, SE, Sarjuni, S.Ag, dan M. Al Iman (Takmir masjid Arrohmah).

Menurut tim Pendiri BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang menggagas untuk segera mendirikan BMT. Karena mayoritas masyarakat lingkungan BMT Ki Ageng Pandanaran yang terletak di jalan mugas dalam adalah memeluk agama Islam. Kantor

pertama BMT Kiageng pandanaran terletak di jalan mugas dalam no 11, yang sekarang menjadi Pos kamling depan masjid Arrohmah. Kantor sementara BMT Ki Ageng Pandanaran pindah di jalan mugas dalam 6 no 11 menempati di rumah dinas kepala sekolah SMP N 10. Secara resmi BMT kami memperoleh izin oprasional pada tanggal 7 Mei 2003 dengan badan hukum: 180.08/25, kemudian atas berkat rahmat Allah SWT pada tanggal 7 Juli 2012 BMT Ki Ageng Pandanaran mendirikan kantor sendiri di Jl. Mugas dalam 6 no 11 Semarang (Maryono, wawancara, 01 September 2016).

Anggota koperasi yang merupakan cikal bakal bangkitnya BMT Ki Ageng Pandanaran selanjutnya disebut sebagai Anggota Pendiri, dari koperasi BMT Ki Ageng Pandanaran. Dengan melihat tahun-tahun terakhir begitu pesat, dan peluang begitu besar, koperasi BMT Ki Ageng Pandanaran insya Allah akan cepat berkembang dan menjadi besar.

Berjalannya waktu, keputusan walikota semarang tentang pengesahan akta perubahan anggaran dasar koperasi BMT Ki Ageng Pandanaran pada tanggal 12 februari 2016 berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Ki Ageng Pandanaran setelah dikeluarkannya peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor 10/per/M.KUKM/IX/2015 tentang kelembagaan koperasi (Dokumentasi Ki Ageng Pandanaran, 07 September 2016).

Secara hakiki koperasi merupakan bentuk pengorganisasian yang tepat dalam menggalang kekuatan ekonomi rakyat, karena hanya dengan mengorganisasikan diri dalam bentuk koperasi rakyat dapat mempersatukan potensi perekonomiannya. Selain itu hanya dengan melalui koperasi pula rakyat secara bersama-sama dapat ikut serta memiliki, mengelola dan menikmati hasil perusahaannya (Revrisond Baswir, 1997: 18).

KSPPS Ki Ageng Pandanaran menerapkan sistem yang sejalan dengan nilai-nilai dan konsep Islami, sebab koperasi syariah merupakan semangat aplikatif bil hal. Koperasi syariah harus mengenalkan nilai dan sistem ekonomi syariah secara persuasif (mengajak) kepada masyarakat. Nilai-nilai Islam yang universal, seperti keadilan (*justice*), persamaan (*musawah*), kebebasan berusaha (*free of enterprise*), pemerataan kesejahteraan, konsep istikhlaf yang meyakini harta adalah amanah Tuhan, serta nilai-nilai positif lainnya akan disampaikan dengan bahasa yang singkat, aplikatif, dan persuasif mudah dicerna masyarakat berbagai strata.

Instrument-instrument dalam ekonomi syariah juga mesti diperkenalkan kepada masyarakat. Pelarangan riba pada semua lembaga keuangan, seruan zakat dan ekonomi Islam lainnya, serta praktik bisnis Islami coba untuk dikampanyekan pada gerakan ini.

Tetapi pada materi ini, seruan yang dikeluarkan secara general, tidak langsung ke salah satu lembaga.

Kegiatan dakwah tentang pemberdayaan ekonomi umat di kelurahan mugassari merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Berangkat dari semangat kegiatan dakwah tersebut KSPPS Ki Ageng Pandanaran dalam proses kemandiriannya memang menerapkan strategi pemasaran syariah dan nilai-nilai dalam pemasaran syariah yang mengambil konsep dari keteladanan sifat Rasulullah SAW.

Suatu upaya terpadu untuk mengembangkan salah satu fungsi masjid disamping sebagai aktualisasi dakwah bil hal ialah menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan ekonomi umat. Semua umat islam dari segala lapisan ekonomi dapat berkiprah di dalamnya.

Kaum dhuafa tidak selalu tepat jika diberikan modal produktif selama mereka dalam cara berpikir dan kebutuhan konsumtifnya masih tinggi, maka untuk hal semacam ini diperlukan upaya ganda. Di samping mereka diberikan modal konsumtif maka secara perlahan mereka diberi modal produktif (*qardul hasan*) serta dampingan proses maupun pengembangannya.

Menghadapi dilema demikian, ada baiknya upaya penguatan ekonomi umat berbasis masjid lebih berimbang kepada kesadaran kolektif terlebih dahulu dan dalam skala yang lebih sederhana dan kecil artinya masing-masing pengelola masjid menghimpun dana umat dari wilayah internal dan dikembangkan untuk wilayah internal terlebih dahulu. Sementara itu tetap berupaya melakukan hubungan kerjasama dengan pihak luar baik masjid yang lain dengan skala lebih besar atau pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan usaha yang dikembangkan.

Dasar pemikiran ini sederhana sekali. Diyakini bahwa pada kelompok-kelompok umat yang terkena masalah sosial baik bertentangan dengan legitimasi agama maupun moral negara, mereka pasti berangkat dari wilayah yang disitu ada masjid. Artinya jika kesadaran kolektif untuk saling membantu antar seama (kesalehan sosial) telah terbentuk dan terwujud dalam aksi nyata maka pembinaannya relatif lebih mudah. Dan hal ini terus diupayakan pada masjid-masjid yang lain sehingga permasalahan umat sekarang terkepung atau berada dalam lingkaran masjid yang memiliki kesadaran kolektif dan karya nyata. Jadi membalikkan situasi yang semula masjid terlingkupi oleh problem kemanusiaan maka dengan gerakan ini terjadi sebaliknya.

Upaya inipun pada dasarnya merupakan upaya memutus mata rantai masalah kemanusiaan tersebut. Dan aset utama umat islam saat ini yang masih mungkin untuk

dikembangkan kembali fungsinya adalah masjid. Muslim yang kaya dapat percaya untuk menitipkan dana ZIS, maupun wakafnya kepada masjid dalam hal ini para pengelolanya, sementara kaum dhuafa hendaknya merasa tentram sebab mereka ada yang mengayomi yaitu masjid untuk kepentingan hidup mereka. Jika upaya ini dilakukan atas nama iman dan kerja profesional, maka tidak akan ada lagi anak-anak yang mengais rizqi melalui jalanan sementara mereka semestinya menuntut ilmu, tidak ada lagi para peminta-minta di jalanan sekalipun mereka miskin namun mereka meyakini tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah.

Lalu apa korelasinya dengan masjid selaku pranata Islam? Meningkatkan kesadaran religius masyarakat pada berbagai aspeknya sesungguhnya juga merupakan agenda koperasi syariah. Dalam hal ini KSPPS Ki Ageng Pandanaran senantiasa menggiatkan hal tersebut melalui unsur-unsur koperasi syariah. Secara sistemik ini diwujudkan dengan memberikan pelayanan dan pengembangan masyarakat. Koperasi mendorong untuk menumbuhkembangkan aktivitas kagamaan di masyarakat terutama berbasis kemasjidan. Pelaksana tugas peningkatan nilai-nilai keagamaan umat diantaranya menghindari riba dan perilaku menyimpang lainnya yang dilatar belakangi oleh faktor ekonomi.

Menjembatani keadaan ini maka peran masjid sebagai pembinaan ekonomi disamping pembinaan mental moral dan semangat keagamaan mahdloh perlu dilakukan. Masjid dapat menampung harta orang kaya melalui zakat, infaq, dan shadaqah dalam lembaga BMT atau koperasi Syariah. Dewasa ini koperasi syariah banyak bertumbuhan karena diyakini mampu stabil dan tahan terhadap situasi kondisi perekonomian secara makro, namun sekali lagi perlu dicatat, hendaknya koperasi syariah bukan hanya bangga jika saldonya terus meningkat namun juga harus lebih bangga lagi jika secara nyata mampu mengangkat perekonomian umat islam yang dhuafa.

Pemberdayaan ekonomi untuk anggota koperasi akan berdampak pada perluasan kesejahteraan pada roda perekonomian anggota. Akses permodalan dapat ditingkatkan melalui peranan koperasi syariah. Koperasi syariah berperan penting dalam menjadikan anggota-anggota yang mandiri dan sejahtera. Kemandirian koperasi merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Namun keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh struktur organisasi yang tepat, pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan para peserta atau aktor yang berkecimpung dalam organisasi tersebut. Tanggung jawab akan tugasnya atau rasa tanggung jawab berkaitan atau dapat dikaitkan dengan tingkat disiplin para peserta organisasi. Semakin baik

disiplin para anggota organisasi, diharapkan kemandirian koperasi dalam mencapai tujuan akan bertambah baik. Lebih-lebih bila rasa taat tersebut diikuti dengan inisiatif yang merupakan pencerminan kreativitas ide yang bernuansa daya dorong dalam mencapai tujuan organisasi dengan lebih baik. Disamping itu efektifitas dan efisiensi dapat menjadi tolok ukur keberhasilan suatu organisasi.

Lembaga keuangan di dalam sistem keuangan modern mempunyai kedudukan yang penting dalam memanfaatkan potensi-potensi ekonomi menjadi sesuatu yang produktif. Karena dengan melalui lembaga keuangan ini, sumber daya keuangan yang ada di masyarakat dapat dikelola dengan baik. Untuk menciptakan lembaga keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, maka disinilah lembaga Baitul Maal Wa Tanwil/ koperasi syariah hadir. Sehingga masyarakat terutama kaum muslim dapat bermuamalah tanpa bertentangan dengan nilai syariah Islam.

Jika kita menolong agama Allah, Dia akan menolong kita dan memantapkan langkah perjuangan mulia ini. Langkah pertama dimulai dengan menyatukan langkah, visi dan misi para pelaku ekonomi syariah yaitu Baitul mal wattamwil atau koperasi syariah, dan masyarakat biasa yang punya ghirah dalam dakwah. Dakwah bil-hal atau berdakwah secara nyata inilah ideologi sebagai motor penggerak dari beberapa gebrakan di tengah-tengah umat, termasuk salah satunya merintis KSPPS Ki Ageng Pandanaran tersebut.

KSPPS Ki Ageng Pandanaran beroperasi mulai tanggal 1 Oktober 1998, pada saat itu masih berbentuk Lembaga Mandiri Mengakar Masyarakat (LM3) dengan modal awal sebesar RP. 12.000.000,00. Dengan modal awal yang tidak terlalu besar, pembiayaan yang diberikan kepada anggota juga terbatas. Setiap anggota hanya bisa melakukan pembiayaan maksimal Rp. 250.000,00 saja (Yayuk Srihartati, Wawancara, 01 September 2016).

Salah satu keberhasilan dari usaha kecil dapat keluar dari krisis ekonomi di Indonesia adalah karena usaha tersebut tidak terlalu bermasalah dengan kredit perbankan, seperti dialami oleh para kelompok usaha besar. Utangnya terlalu kecil dan kredit macet yang ditanggung tidak lebih dari 0,5 %, sedangkan kredit pengusaha besar mencapai 70 % dari total hutangnya yang berjumlah ratusan triliun rupiah di perbankan. Hal tersebut menunjukkan bahwa usaha kecil lebih mandiri dalam kegiatan ekonomi, karena mampu berusaha tanpa didukung pihak lain. Kemandirian ini tampak dari modal dan teknologi industri yang digunakan milik sendiri walaupun sederhana dalam kegiatan korporasi modern.

KSPPS Ki Ageng Pandanaran memberikan modal pembiayaan yang terbatas selain karena keterbatasan modal tetapi juga sebagai antisipasi jika ada anggota dalam pembiayaan mengalami kemacetan maka tidak akan terpengaruh dalam permodalan. Sebagai asumsi jika koperasi mempunyai modal 50 juta bisa saja diberikan kepada satu anggota saja. Akan tetapi, akan lebih efektif jika diberikan kepada lima anggota yang membutuhkan pembiayaan. Karena jika satu anggota saja yang diberikan pembiayaan sebesar 50 juta dan mengalami kemacetan maka akan terjadi stagnasi dana. Sebaliknya jika 50 juta tersebut diberikan kepada lima anggota dan salah satu anggota mengalami kemacetan dalam pembiayaan maka akan tertutup dari pembayaran pembiayaan anggota lainnya. Sehingga dana dalam koperasi dapat berputar dan tidak mengalami kekurangan dalam pemodalannya (Maryono SE., Wawancara, 01 September 2016).

Tahun 2003 menjadi titik balik dari perkembangan KSPPS Ki Ageng Pandanaran, dibawah pengurus baru KSPPS ini dapat berkembang dengan baik, karena pengurus dan anggota koperasi saling bahu membahu untuk memajukan KSPPS yang mereka cintai.

Suatu upaya terpadu untuk mengembangkan salah satu fungsi masjid disamping sebagai aktualisasi dakwah bil hal ialah menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan ekonomi umat. Semua umat Islam dari segala lapisan ekonomi dapat berkiprah di dalamnya.

Anggota koperasi yang merupakan cikal bakal bangkitnya KSPPS Ki Ageng Pandanaran selanjutnya disebut sebagai Anggota Pendiri, dari KSPPS Ki Ageng Pandanaran. Dengan melihat tahun-tahun terakhir begitu pesat, dan peluang begitu besar, KSPPS Ki Ageng Pandanaran insya Allah akan cepat berkembang dan menjadi besar.

Usaha untuk meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat dilakukan antara lain melalui kegiatan penerangan, penyampaian informasi, penertiban dan pembinaan kelompok masyarakat untuk diarahkan menjadi anggota koperasi. KSPPS Ki Ageng Pandanaran dalam meningkatkan koperasi melakukan pendekatan kepada ibu-ibu pengajian. Di sekitar kelurahan mugassari banyak majlis taklim yang dibentuk oleh ibu-ibu. Sehingga dalam penghimpunan dan penyaluran dana pembiayaan lebih mudah dan kolektif. Dan untuk mengembangkan kerjasama antar koperasi dengan majlis taklim lainnya, staf koperasi khususnya yang bertugas menangani bidang strategi pemasaran di KSPPS Ki Ageng Pandanaran untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di kelurahan mugassari dan sekitarnya.

Selama 18 tahun KSPPS Ki Ageng Pandanaran kini telah tumbuh menjadi koperasi syariah yang konsisten terhadap nilai-nilai syariah di Semarang, khususnya di kelurahan Mugassari. Artinya, lembaga keuangan mikrosyariah ini bisa diterima oleh semua kalangan. Bukan hanya Muslim, tetapi juga non-Muslim. Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah, KSPPS Ki Ageng Pandanaran bisa memberikan solusi dalam usaha pemberdayaan usaha kecil serta menjadi inti kekuatan ekonomi berbasis kerakyatan. Operasinya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sulit diikuti oleh perbankan (bagi bank, cost-nya jadi mahal).

Tumbuhnya KSPPS Ki Ageng Pandanaran bisa memberikan solusi pembiayaan (penyaluran modal) yang mudah dan cepat, terutama untuk para wirausaha atau masyarakat yang benar-benar membutuhkan dana untuk melebarkan usaha dalam hal ini pembiayaan *mudharabah* dan untuk *qardul hasan* sebagai pembiayaan yang hanya diharuskan untuk mengembalikan pokoknya saja tanpa ada bagi hasil dan hanya diperuntukkan kepada kaum dhuafa sebagai dana darurat untuk kebutuhan bayar rumah sakit atau biaya mengurus jenazah.

KSPPS Ki Ageng Pandanaran berusaha untuk menjadi koperasi syariah yang tidak hanya sebagai lembaga profit melainkan juga sebagai lembaga yang memberikan solusi untuk kehidupan umat yang lebih adil, nyaman, dan sejahtera. Kegiatan pemasaran KSPPS Ki Ageng Pandanaran dilandasi semangat beribadah kepada Tuhan Sang Maha Pencipta, berusaha semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan golongan apalagi kepentingan sendiri.

Kemandirian KSPPS Ki Ageng Pandanaran yang ditandai dengan keberhasilan dalam meningkatkan anggaran dan pendapatan belanja, mengharuskan setiap elemen pembiayaan untuk dapat digunakan sebagai instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Fenomena kemiskinan dan terhimpitnya kondisi ekonomi membawa konsekuensi semakin tinggi kesenjangan sosial dan rentannya untuk menggadaikan iman demi memenuhi kebutuhan. Tentunya kenyataan ini berdampak pada aktivitas keagamaan yang semakin pudar dan akhirnya masjid ditinggalkan oleh para jemaahnya. Penguatan daya dukung perekonomian suatu koperasi syariah diharapkan dapat membantu umatnya dalam memberikan dukungan baik moral maupun materi supaya mereka tidak lagi bergantung pada orang-orang yang mempunyai kepentingan. Terletak pada efektivitas dan efisien pemberian pembiayaan dalam pemberdayaan ekonomi umat pada koperasi syariah, semakin besar daya dukungnya terhadap perekonomian anggota.

B. Visi, Misi, dan Moto KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang

1. VISI

Menjadi lembaga keuangan syariah yang profesional dan dapat mensejahterakan Ekonomi umat, sehingga menjadi lembaga keuangan kepercayaan umat

2. MISI

- a. Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan lingkungan sekitar kerja pada umumnya.
- b. Mengembangkan usaha produktif bagi anggota dan masyarakat sekitar di kota Semarang
- c. Bekerja secara professional, amanah, ikhlas, dan sesuai dengan kaidah syariah

3. Moto

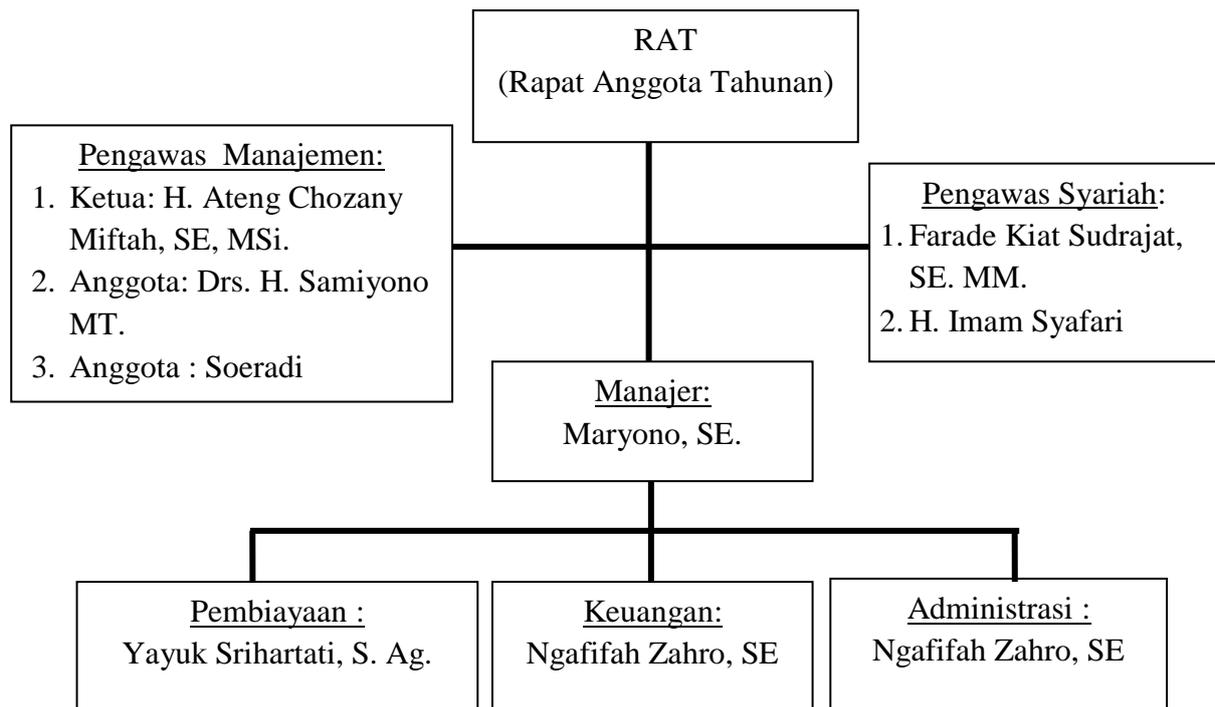
“Hadir Untuk Kesejahteraan Umat”

C. Struktur organisasi KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang

Dalam badan usaha diperlukan adanya kepengurusan yang masing-masing bertanggung jawab atas tugasnya. Tugas dan tanggung jawab tersebut dapat di lihat dari struktur organisasi perusahaan.

Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Ki Ageng Pandanaran Periode 2015 s/d 2019 :

Gambar 1 : Bentuk Struktur organisasi KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang



Sumber : KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang 07 September 2016

Tugas dan wewenang

1. Dewan Pembina

Bertugas pembinaan/ masukan agama maupun manajemen terhadap KSPPS Ki Ageng Pandanaran.

2. Dewan pengawas Syariah

Bertugas memberikan nasihat dan saran pada direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional lembaga keuangan Syariah dan sebagai mediator antara Lembaga keuangan Syariah dengan DSN-MUI.

3. Manager

- a) Memimpin organisasi dan segala kegiatan usaha KSPPS.
- b) Bertanggung jawab kepada pemegang saham atas terselenggaranya kegiatan dan hasil usaha yang telah dicapai.
- c) Mengkoordinasikan kegiatan operasional KSPPS secara keseluruhan sesuai peraturan perusahaan, sistem dan prosedur perusahaan anggaran dasar perusahaan. Termasuk mengevaluasi serta memutuskan setiap permohonan pembiayaan.
- d) Menandatangani perjanjian pembiayaan.

- e) Mengatur dan melakukan segala tindakan dalam rangka untuk melindungi dan menjaga kekayaan KSPPS.

4. Pembiayaan

- a) Menerima kelengkapan berkas-berkas administrasi pembiayaan anggota KSPPS.
- b) Melaksanakan keadministrasian pembiayaan.
- c) Pencatatan setiap pembiayaan jatuh tempo, jadwal pembayaran, tunggakan serta mengklasifikasikan jenis jaminan.
- d) Mengerjakan laporan-laporan yang berkaitan dengan pembayaran.

5. Akunting

- a) Menyusun, mengatur, menyiapkan buku besar, laporan laba rugi anggaran KSPPS dan menjaga agar system pembukuan diterapkan sebagai mana mestinya dan menyimpan di tempat yang aman.
- b) Bertanggung jawab atas seluruh administrasi kegiatan usaha KSPPS.
- c) Membuat laporan keuangan harian, bulanan dalam neraca, laporan laba rugi dan posisi saldo.
- d) Membuat laporan-laporan keuangan lainnya yang diperlukan.

6. Marketing

- a) Memperkenalkan produk KSPPS dalam mencari peluang kerjasama (lending) serta mengembangkan sektor ekonomi yang dapat dibantu. Bertanggung jawab terhadap bagian pembiayaan terhadap amanah yang dijalani.
- b) Melakukan survey dan mendata anggota mengenai jaminan usaha jenis pembiayaan yang sesuai dengan calon anggota KSPPS.
- c) Membuat dan mengatur rencana kunjungan dan membuat laporan kepada bagian pembiayaan.

7. Teller

- a) Mengelola keuangan sesuai rencana/ anggaran KSPPS.
- b) Bertanggung jawab keluar masuknya uang kas.
- c) Merencanakan kebutuhan uang untuk kebutuhan transaksi.
- d) Menerima dan membayarkan uang kepada anggota KSPPS atas seluruh transaksi berdasarkan sejumlah bukti-bukti yang sah.

D. Produk- produk

1. Simpanan

a) Simpanan Wajib

Merupakan simpanan yang wajib dibayarkan oleh setiap anggota secara rutin. Minimal untuk simpanan wajib adalah Rp. 5.000,-.

b) Simpanan Pokok

Merupakan simpanan yang harus dibayarkan anggota saat pertama kali menjadi anggota. Simpanan pokok hanya dilakukan sekali selama menjadi anggota, besar simpanan pokok adalah Rp. 50.000,-.

c) Simpanan Sukarela

Merupakan simpanan yang dilakukan secara bebas atau sukarela. Setoran pertama simpanan sukarela adalah sebesar Rp.10.000,- setoran berikutnya sekurang-kurangnya Rp. 2.500,- Saldo minimum sebesar Rp. 10.000,-. Penarikan Simpanan Sukarela dapat dilakukan setiap hari selama kas buka.

d) Simpanan Berjangka

Merupakan simpanan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu, untuk KSPPS Ki Ageng Pandanaran dapat melakukan simpanan berjangka minimal dalam waktu 1 tahun. Setoran pertama sekurang-kurangnya Rp. 100.000,-. Penarikan hanya bisa dilakukan ketika jatuh tempo, apabila belum jatuh tempo sudah dilakukan penarikan maka akan dikenakan denda.

e) Simpanan Qurban

Merupakan simpanan yang akan digunakan untuk keperluan qurban. Untuk setoran pertama sebesar Rp. 25.000,-, dan untuk setoran selanjutnya berapapun diterima. Pengambilan hanya dapat dilakukan pada tanggal 4 Dzulhijjah atau satu minggu berturut-turut menjelang Hari Raya Qurban.

f) Simpanan Lebaran

Merupakan simpanan yang akan digunakan untuk keperluan lebaran. Besaran simpanan lebaran per bulan adalah Rp. 55.000,-per 12 kali, dapat diambil ketika lebaran, dapatnya berupa jajan lebaran

Untuk prosedur pembuatan rekening hanya mengisi formulir pembuatan rekening dan menyantumkan *foto copy* KTP. Sedangkan prosedur untuk menjadi anggota adalah dengan mengisi formulir permohonan menjadi anggota dengan

melampirkan *foto copy* KTP Suami dan Istri, atau jika belum mempunyai Suami atau Istri yang dicantumkan adalah *foto copy* KTP wali yang bersangkutan.

2. Pembiayaan

a) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota, dengan semua modal yang berasal dari KSPPS Ki Ageng Pandanaran. Dan atas keuntungan yang diperoleh anggota disepakati pembagian keuntungannya/nisbahnya di awal.

b) Pembiayaan Al Ijarah

Pembiayaan yang diberikan kepada anggota dalam hal pembiayaan sewa beli rumah, toko, mobil, rehab rumah, dll.

c) Pelayanan PPOB

Melayani pembayaran tagihan telepon, listrik, dan air (PDAM).

d) Gadai Emas

Melayani pegadaian emas bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri untuk memperhitungkan nilai ekonomis dari emas yang digadaikan.

e) Pelayanan Sembako

Menyediakan toko yang menyediakan berbagai bahan sembako dengan harga yang terjangkau, serta melayani jasa antar barang sembako tanpa dipungut biaya.

E. Cara Pengajuan Pembiayaan Investasi

Pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan atau piutang yang dapat dipersamakan dengan itu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah definisi pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah salah satu jenis dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah untuk menyediakan dana atau tagihan

kepada masyarakat atau nasabah dengan kewajiban mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (margin) atau bagi hasil.⁴

KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang memberikan definisi pembiayaan investasi mudharabah yaitu dapat membantu anggota untuk memberikan pinjaman sebagai modal untuk berinvestasi yang dibutuhkan anggota atau calon anggota KSPPS⁵. Seorang calon anggota KSPPS yang bermaksud membuka usaha tetapi dia tidak mempunyai uang yang cukup untuk berwirausaha, calon anggota KSPPS bisa mengajukan permohonan ke pihak KSPPS untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan investasi mudharabah. Setelah calon anggota mengisi persyaratan pengajuan pembiayaan investasi kemudian pihak KSPPS memberikan pinjaman uang secara tunai, kemudian anggota KSPPS harus melunasi dana pembiayaan investasi yang dipinjam secara angsuran dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pembiayaan yang diajukan tidak langsung dicairkan begitu saja, maksudnya bahwa setiap pembiayaan investasi yang diajukan calon anggota KSPPS harus melalui tahap-tahap atau proses yang ditetapkan oleh KSPPS dan dijadikan pedoman dalam memberikan pembiayaan.

Adapun prosedur pemberian pembiayaan investasi pada KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang (Yayuk Srihartati, Wawancara, 26 Agustus 2016):

1. Sebagai bukti permohonan pembiayaan investasi anggota KSPPS harus mengisi formulir aplikasi permohonan pembiayaan yang disediakan oleh KSPPS, menandatangani dan melengkapi semua persyaratan administratif yang harus dilampirkan, selain mendapatkan informasi seluk beluk pembiayaan investasi calon anggota juga diberi tahu syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain: berapa besar pinjaman uang yang diajukan kepada KSPPS, jumlah angsuran yang harus diangsur, dan lamanya angsuran.
2. Calon anggota harus membuka rekening di KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang.
3. Ada barang yang dijaminkan, dan wewenang KSPPS untuk melakukan sita jaminan apabila terjadi wanprestasi oleh anggota.
4. Menandatangani akad Mudharabah sebagai tanda persetujuan terhadap surat tersebut.
5. Surat permohonan pembiayaan investasi merupakan akad dibawah tanda tangan antara calon anggota dengan KSPPS, karena pada dasarnya antara calon anggota dengan KSPPS telah tercapai kesepakatan meliputi semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota yang dibuktikan dengan ditandatanganinya surat tersebut oleh calon anggota.

6. Setelah dipenuhi, selanjutnya adalah anggota KSPPS memenuhi kewajibannya mengangsur pembayaran secara teratur kepada KSPPS sesuai dengan ketentuan disepakati didalam akad sampai lunas.

F. Perekonomian KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang

Perekonomian KSPPS Ki ageng Pandanaran terdiri dari pemasaran produk, sumber modal, aset. Adapun besarnya kenaikan dari permodalan koperasi adalah tergantung pada peningkatan jumlah anggota dan jumlah tabungan anggota. Meskipun anggotanya banyak, tapi kalau tidak ada yang menabung dan meminjam, maka usaha koperasi tersebut tidak akan dapat meningkatkan kemandiriannya. Karena khusus untuk koperasi simpan pinjam sangat tergantung pada peningkatan kesejahteraan anggota dan kegiatan serta keaktifan dari masing-masing pengelola sekaligus anggota.

1. Pemasaran produk KSPPS

Pemasaran produk adalah peranan penting Karena, selain untuk mensosialisasikan ekonomi syariah melalui program-program yang telah dimiliki, pemasaran juga berdampak berkembang atau tidaknya sebuah KSPPS. KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang membagi 5 wilayah pemasaran

Tabel 1: wilayah pemasaran KSPPS Ki Ageng Pandanaran

No	Wilayah	Tujuan Pemasaran
1	Kota	Mugas sari, Kel. Pakunden
2.	Utara	Petek, TPI(Tempat Pelelangan Ikan)
3.	Timur	Gayamsari, Pedurangan
4.	Selatan	Banyumanik, Gunung Pati
5.	Barat	Karang Ayu, Tugu

Sumber: bagian pembiayaan KSPPS Ki Ageng Pandanaran 01 September 2016

Tabel 2: Pembiayaan Investasi Yang Disalurkan

Tahun	Pembiayaan Investasi	
	Debitur	Rupiah
2010	557	1.354.945.500
2012	703	1.725.370.370
2015	590	1.772.822.875

Sumber: bagian pembiayaan KSPPS Ki Ageng Pandanaran 01 September 2016

Tabel 3: Realisasi Tingkat Kolektabilitas Pembiayaan

Kolektabilitas	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
	Debitur (%)	Outstanding (Rp)	Debitur (%)	Outstanding (Rp)	Debitur (%)	Outstanding (Rp)
Lancar	95,69	1.692.794.992	95,69	1.937.921.109	95,69	1.696.414.209
Kurang lancar	2,15	38.034.374	2,15	43.519.223	2,15	38.115.692
Diragukan	1,14	20.167.063	1,12	22.670.479	1,14	20.210.181
Macet	1,02	18.044.215	0,09	20.039.084	0,13	18.082.7931

Sumber: Bagian pembiayaan mudharabah KSPPS Ki Ageng Pandanaran 01 September 2016.

2. Sumber modal KSPPS Ki Ageng Pandanaran

Komponen modal sendiri merupakan modal dasar bagi KSSPS Ki Ageng Pandanaran, komponen modal sendiri bersumber dari: Simpanan Pokok, Simpanan Sukarela, Simpanan Wajib, dan cadangan modal.

Table 4: Data Perkembangan KSPPS Ki Ageng Pandanaran

Uraian	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2015
Modal Sendiri	45.079.050	52.415.148	539.346.882
Dana Pihak Ketiga	122.221.082	140.409.023	1.068.588.601
Asset	338.319.902	401.708.487	3.952.801.508
Simpanan/ Tabungan	165.256.663	201.248.897	590.263.831
Outstanding	180.263.417	233.090.667	1.722.822.875
SHU	1.871.501	2.648.148	18.332.715

Sumber: KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang 01 September 2016

G. Strategi Pemasaran dan Manajemen Strategi Dalam Pengelolaan Usaha

Di KSPPS Ki Ageng Pandanaran ini strategi *aggressive maintenance strategy* atau lebih dikenal dengan *strategi jemput bola* yang dipadu dengan sistem *excellent service*, artinya bahwa KSPPS dalam mencari dan menarik minat anggota dengan mempererat silaturahmi, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan para petugas langsung mendatangi calon anggota ataupun yang sudah menjadi anggota di rumah atau di tempat usaha mereka (pasar) yang prioritaskan itu agar produk-produk yang dihasilkan dapat diterima masyarakat dan juga dapat membantu orang kecil dan menengah. Dalam Perkembangan KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang tidak terlepas dari komitmen untuk melaksanakan strategi pemasaran syariah dengan nilai-nilai yang mengambil konsep dari keteladanan sifat Rasulullah SAW, yaitu sifat *shiddiq* dapat dilihat pada aspek pelayanan pembiayaan yang jujur dan transparan, *amanah* dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab atas dana yang terhimpun dari anggota, *fathanah* dengan mengikuti Pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM, dan *tabligh* yaitu mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam setiap gerak aktivitas ekonomi yang dilakukan sehari-hari. Di samping itu KSPPS juga mengembangkan nilai *istiqamah* yaitu konsisten dalam penerapan aturan syariah.

Keberhasilan suatu lembaga tidak lepas dari mata rantai yang ada dalam lembaga tersebut, dan syarat agar terpenuhinya standar nilai suatu lembaga yang sehat harus tersedianya :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai
2. Modal sebagai penunjang jalannya usaha
3. Manajemen yang harmonis dalam suatu lembaga
4. Komunikasi yang harmonis dalam suatu lembaga
5. Perangkat kerja yang menunjang kelancaran suatu usaha
6. Perangkat umum untuk melindungi eksistensi dan mengatur mekanisme kerja karyawan.

Sehingga tercipta suatu sistem untuk membentuk sinergi antara semua komponen yang ada di dalam lembaga tersebut, demikian juga KSPPS Ki Ageng Pandanaran, mereka mencoba agar bisa menjadi lembaga yang sehat. Untuk itu ada beberapa hal yang mereka lakukan, diantaranya :

1. Pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikuti berbagai pelatihan di luar baik dalam taraf lokal maupun skala nasional.
2. Menjadi anggota di PBMT Indonesia , dengan harapan bisa mendapatkan tambah permodalan dan bisa menambah luas wawasan tentang manajemen KSPPS.
3. Menjadi anggota Puskopsyah Jawa Tengah.
4. Ikut serta dalam Perhimpunan BMT Indonesia Korwil Jawa Tengah.
5. Meningkatkan daya tarik KSPPS dalam rangka menarik dana dari masyarakat lewat simpanan pokok, simpanan Qurban, maupun simpanan sukarela dan dalam waktu dekat siap untuk menerima penyertaan modal dari para anggota badan pendiri dan simpanan jangka panjang.

Penambahan hardware dan software computer sebagai penunjang kelancaran kerja (Yayuk Srihartati, Wawancara, 26 Agustus 2016).

Dalam kaitannya dengan pengelolaan usaha di tingkat manajer adalah penting untuk diperhatikan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh pemimpin tersebut yang berdampak pada kinerja pengurus lainnya. Manajemen adalah suatu bentuk kerja. Manajer, dalam melakukan pekerjaannya, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, yang dinamakan fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri dari:

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan dalam KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang adalah untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota, dengan menggalang dan menghimpun dana dari anggota dan calon anggota yang dipergunakan untuk membiayai usaha-usaha anggota. Serta menghimpun dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) dari anggota dan masyarakat dan mengembangkan pendayagunaan dana ZIS tersebut kepada yang berhak. Dana yang digalang pun dari sumber yang halal dan baik. Tidak hanya itu, KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang juga mengembangkan usaha-usaha sektor riil yang menunjang usaha anggotanya.

Adapun visi dan misi KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang adalah menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota khususnya dan umat manusia pada umumnya.

Misi dari KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang adalah mewujudkan gerakan pembebasan anggota & masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan, & ekonomi ribawi. Serta mewujudkan gerakan pemberdayaan dan gerakan keadilan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Agar tujuan tercapai maka dibutuhkan pengorganisasian. Dalam perusahaan atau lembaga biasanya diwujudkan dalam bentuk bagan organisasi. Yang kemudian dipecah menjadi berbagai jabatan. Pada setiap jabatan biasanya memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan uraian jabatan. Pengurus KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang adalah pengurus yang bertanggung jawab penuh pada pelaksanaan program dan pencapaian tujuan KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang. Adapun pengelola adalah tenaga profesional yang melaksanakan kegiatan operasional program kerja yang menjadi tanggung jawab pengurus.

Dengan proses pengorganisasian ini, KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang menetapkan struktur organisasi kegiatan yang terdiri dari :

- a. RAT (Rapat Anggota Tahunan), merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan seluruh anggota memiliki hak yang sama untuk meminta keterangan dan pertanggung jawaban dari pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan.
- b. Badan Pengawas Syariah (DPS), bertanggung jawab mengawasi kegiatan usaha, memberikan nasehat dan saran kepada pengurus.
- c. Badan Konsultan Manajemen, bertanggung jawab dalam membuat kebijakan umum dan melakukan pengawasan pelaksanaan, melakukan pemeriksaan terhadap pengelola, dan membuat laporan hasil pengawasan.
- d. Pengurus, adalah orang-orang yang dipilih oleh anggota dalam rapat anggota.
- e. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sebagai lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi, maka salah satu syarat lain dalam alat organisasi adalah adanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Hal ini merupakan dasar atau pedoman umum dalam pengambilan keputusan bagi pengurus dalam menjalankan kegiatannya.

3. *Staffing*

Hal mendasar yang harus diperhatikan adalah strategi KSPPS dalam kaitannya dengan *human capital*. Masalah sumberdaya manusia adalah masalah krusial dalam suatu operasionalisasi organisasi, karena sebagian besar kebangkrutan organisasi disebabkan oleh rendahnya kualitas pengelolanya. Berbicara tentang pengelolaan sumberdaya manusia di KSPPS maka tidak lepas dari kualitas skill dan kualitas spiritual. Kualitas skill merujuk pada perilaku profesional dari pengelola KSPPS dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut maka KSPPS perlu melakukan program-program yang dapat meningkatkan profesionalisme pengurus

melalui pelatihan kepemimpinan, workshop, ataupun pembinaan manajerial. Sedangkan kualitas spiritual lebih merujuk pada implementasi nilai-nilai Islam pada setiap aktivitas pengelola KSPPS. Dalam hal ini maka peran ulama' sangatlah penting untuk mencetak kader-kader yang handal untuk mengelola KSPPS.

4. Pengarahan/Pelaksanaan (*Actuating*)

Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan kerjasama. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Kecuali memang ada hal-hal khusus sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi dan peran, serta keahlian masing-masing untuk mencapai visi, misi dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan.

5. Pengawasan/Pengendalian (*Controlling*)

Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan dan program kerja maka dibutuhkan pengontrolan. Baik dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspeksi hingga audit. Controlling berfungsi sebagai suatu proses evaluasi tentang proses organizing dan actuating apakah telah terlaksana sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, dan yang pastinya tidak melanggar dengan aturan Syariah.

Dalam pengawasan ini adalah Dewan pengawas Syariah yang bertugas memberikan nasihat dan saran pada direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional lembaga keuangan Syariah dan sebagai mediator antara Lembaga keuangan Syariah dengan DSN-MUI (Maryono SE., Wawancara, 01 September 2016).

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan KSPPS Ki Ageng Pandanaran :

1. Faktor Internal

- a. Lemahnya keterampilan dan kesadaran koperasi, disebabkan karena kekurangan kader pengurus koperasi, dan Badan pengawas yang pasif, rapat umum yang pasif.
- b. Kekurangan modal, sehingga punya daya tawar yang lemah, kemudian diikuti dengan daya pembina bisnis/usaha anggota yang lemah.
- c. Skill, lemahnya pengetahuan dan teknologi menyebabkan lemahnya informasi, komunikasi dan transformasi
- d. Sarana dan prasarana yang kurang memadai.

2. Faktor Eksternal

- a. Persaingan dengan pihak lembaga keuangan yang lain, seperti perbankan melalui Kredit Usaha Rakyat, pegadaian, dan lain-lain.
- b. Kepercayaan pihak ketiga lemah, sehingga mitra usaha koperasi berkurang.
- c. Akibat perubahan dinamis seperti aspek politik, dengan adanya perubahan harga BBM yang sering diikuti dengan kenaikan barang kebutuhan yang lainnya, dampak dari hasil teknologis, secara positif memang meringankan beban masyarakat sebagai konsumen barang elektronik untuk kebutuhan rumah tangga, sedang dengan adanya jaringan komunikasi melalui internet dapat merubah budaya saling membantu menjadi lebih individual, sehingga dapat mengurangi jiwa sosial untuk bekerjasama dan globalisasi sebagai wujud persaingan bebas dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat utamanya dengan masuknya berbagai macam barang dari luar yang dianggap lebih murah bisa mematikan usaha petani dan peternak. Seperti bawang putih impor, beras impor, ayam impor, daging sapi impor dan lain-lain.
- d. Kebijakan pemerintah di bidang perekonomian sangat dibutuhkan agar terjadi keseimbangan, keadilan dan pemerataan pendapatan sebagai usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama antara pelaku usaha koperasi, pemerintah dan pihak swasta (Yayuk Srihartati, Wawancara, 26 Agustus 2016).

H. Anggota KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang

Anggota Koperasi KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang adalah orang-orang yang telah memenuhi syarat sebagai anggota, sesuai pasal 4 Bab IV dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga KSPPS Ki Ageng Pandanaran Semarang adalah sebagai berikut :

1. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan-tindakan hukum.
2. Bertempat tinggal di kota Semarang.
3. Mata Pencaharian : PNS, Dosen, Pensiunan, Usaha Swasta, Karyawan Swasta, dan Pedangan.
4. Telah menyatakan kemampuan tertulis untuk melakukan simpanan pokok.
5. Telah menyetujui anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
6. Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak dan

Kewajiban keanggotaanya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga. Sedangkan ketentuan- ketentuan mengenai anggota juga dibahas dalam Bab IV pasal 5, diantara ketentuan- ketentuan anggota antara lain sebagai berikut :

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
2. Keanggotaan koperasi berlaku hanya dibuktikan dalam buku daftar anggota.
3. Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanya dibuktikan dengan catatan dan buku daftar anggota.
4. Seseorang yang akan masuk menjadi anggota koperasi harus mengajukan surat permohonan kepada pengurus.
5. Bila pengurus menolak permohonan untuk menjadi anggota maka yang berkepentingan dapat meminta pertimbangan pada rapat anggota yang berikutnya.
6. Permohonan berhenti harus diajukan tertulis kepada pengurus.